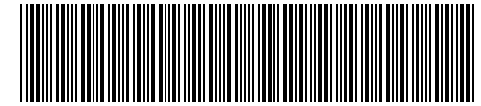




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 013.01.2.408818/2024**



DS:0099-6156-7011-8684

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
  2. Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
  3. Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
  4. Kode>Nama Satker : (408818) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN
- Sebesar : Rp. 20.390.985.000 ( DUA PULUH MILIAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.01.WA Program Dukungan Manajemen

013.01.WA. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

	Jumlah Uang
Rp.	20.390.985.000
Rp.	20.390.985.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	20.390.985.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN PALEMBANG (014) Rp. 20.390.985.000

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408818/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0099-6156-7011-8684

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408818) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

Halaman : I A. 1

Program	:	013.01.WA	Program Dukungan Manajemen			20.390.985.000		
Kegiatan	:	1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM			20.390.985.000		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	1558.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	18.046.885.000	
Rincian Output	:	01	EBA.956	Layanan BMN	1,00	Layanan	220.520.000	
			02	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1,00	Layanan	604.715.000
			03	EBA.959	Layanan Protokoler	1,00	Layanan	193.770.000
			04	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	119.362.000
			05	EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	81.860.000
			06	EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	16.826.658.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	1558.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	7,00	Unit, m2, Paket	120.550.000	
Rincian Output	:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal	7,00	Unit	120.550.000	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1558.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	191,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	305.590.000	
Rincian Output	:	01	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	191,00	Layanan	305.590.000	
Klasifikasi Rincian Output	4	:	1558.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1.917.960.000	
Rincian Output	:	01	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Dokumen	685.920.000	
			02	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	538.170.000
			03	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1,00	Dokumen	394.530.000
			04	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1,00	Dokumen	273.620.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408818/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0099-6156-7011-8684

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408818) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

Halaman : I A. 2

---

Layanan Manajemen Kinerja Internal			Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	
05	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00 Dokumen	25.720.000

---

Jakarta, 24 November 2023  
Sekretaris Jenderal

ttd.

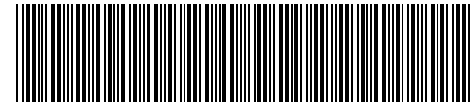
KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**NOMOR : DIPA- 013.01.2.408818/2024**

**I B. SUMBER DANA**



DS:0099-6156-7011-8684

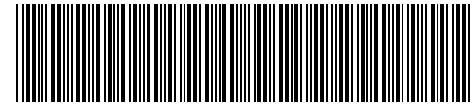
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal  
 Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
 Kode>Nama Satker : (408818) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

		Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	20.390.985.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	20.390.985.000		(2) RPLN US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408818/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



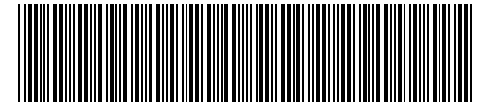
DS:0099-6156-7011-8684

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408818) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408818	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN	12.242.645	8.027.790	120.550	-	-	20.390.985		
013.01.WA	Program Dukungan Manajemen	12.242.645	8.027.790	120.550	-	-	20.390.985		
1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	12.242.645	8.027.790	120.550	-	-	20.390.985		
1558.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	12.242.645	5.804.240	-	-	-	18.046.885	11 . 51	
01 RM		12.242.645	5.804.240	-	-	-	18.046.885	014	
1558.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	-	120.550	-	-	120.550	11 . 51	
01 RM		-	-	120.550	-	-	120.550	014	
1558.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	305.590	-	-	-	305.590	11 . 51	
01 RM		-	305.590	-	-	-	305.590	014	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408818/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0099-6156-7011-8684

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408818) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

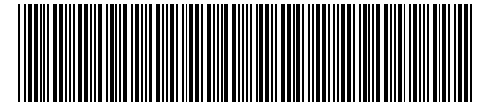
KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1558.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	1.917.960	-	-	-	1.917.960	11 . 51	
01	RM	-	1.917.960	-	-	-	1.917.960	014	
<b>JUMLAH</b>		<b>12.242.645</b>	<b>8.027.790</b>	<b>120.550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.390.985</b>		

Jakarta, 24 November 2023  
Sekretaris Jenderal

ttd.

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408818/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0099-6156-7011-8684

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408818) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

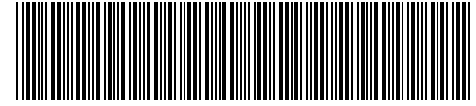
NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408818	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	1.691.251	1.821.268	1.688.607	1.688.609	1.687.607	1.687.609	1.688.467	1.687.609	1.688.407	1.687.609	1.688.607	1.685.334	20.390.985
		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.022.645	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	12.242.645
		<b>BELANJA BARANG</b>	668.606	680.718	668.607	668.609	667.607	667.609	668.467	667.609	668.407	667.609	668.607	665.334	8.027.790
		<b>BELANJA MODAL</b>	0	120.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.550
	013.01.WA.1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1.691.251	1.821.268	1.688.607	1.688.609	1.687.607	1.687.609	1.688.467	1.687.609	1.688.407	1.687.609	1.688.607	1.685.334	20.390.985
		51 BELANJA PEGAWAI	1.022.645	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	12.242.645
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	668.606	680.718	668.607	668.609	667.607	667.609	668.467	667.609	668.407	667.609	668.607	665.334	8.027.790
		53 BELANJA MODAL	0	120.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.550

Jakarta, 24 November 2023  
Sekretaris Jenderal

ttd.

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408818/2024  
IV A. B L O K I R**



DS:0099-6156-7011-8684

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [408818] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Sekretaris Jenderal

ttd.  
KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408818/2024  
IV B. C A T A T A N**



DS:0099-6156-7011-8684

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [408818] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

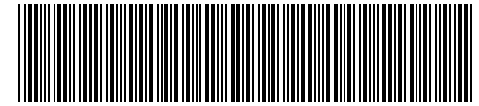
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Sekretaris Jenderal

ttd.  
KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 013.06.2.408814/2024**



DS:7784-2900-8166-8051

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
  2. Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
  3. Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
  4. Kode>Nama Satker : (408814) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN
- Sebesar : Rp. 1.425.175.000 ( SATU MILIAR EMPAT RATUS DUA PULUH LIMA JUTA SERATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.06.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

013.06.BF.5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

	Jumlah Uang
Rp.	1.425.175.000
Rp.	1.425.175.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	1.425.175.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PALEMBANG (014) Rp. 1.425.175.000

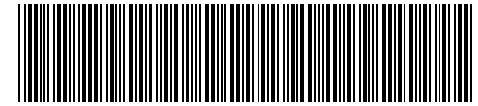
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408814/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7784-2900-8166-8051

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408814) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

Halaman : I A. 1

Program	:	013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.425.175.000
Kegiatan	:	5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			1.425.175.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani			
		2. 01	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima			
		3. 02	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5254.BHB	Operasi Bidang Keamanan	29,00	operasi, Hari Operasi	490.737.000
Rincian Output	:	01	BHB.U01 Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah	24,00	operasi	353.800.000
		02	BHB.U02 Operasi Mandiri di Wilayah	3,00	operasi	58.950.000
		03	BHB.U03 Operasi Gabungan di Wilayah	1,00	operasi	45.839.000
		04	BHB.U04 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1,00	operasi	32.148.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5254.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	20,00	Orang, Laporan	891.208.000
Rincian Output	:	01	BIB.004 Pembinaan dan Koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian	20,00	Laporan	891.208.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	5254.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	1,00	laporan	43.230.000
Rincian Output	:	01	BKA.001 Pengawasan Orang Asing	1,00	laporan	43.230.000

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Imigrasi

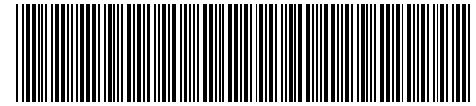
ttd.  
Silmy Karim, S.E., M.E.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**NOMOR : DIPA- 013.06.2.408814/2024**

**I B. SUMBER DANA**



DS:7784-2900-8166-8051

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi  
 Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
 Kode>Nama Satker : (408814) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	1.425.175.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	1.425.175.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408814/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7784-2900-8166-8051

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408814) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN  
Kewenangan : (KD)

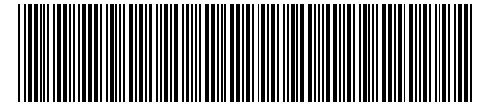
Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408814	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN	-	1.425.175	-	-	-	1.425.175		
013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.425.175	-	-	-	1.425.175		
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	-	1.425.175	-	-	-	1.425.175		
5254.BHB	Operasi Bidang Keamanan (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	490.737	-	-	-	490.737	11 . 51	
04	PNBP	-	490.737	-	-	-	490.737	014	
5254.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	891.208	-	-	-	891.208	11 . 51	
04	PNBP	-	891.208	-	-	-	891.208	014	
5254.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	43.230	-	-	-	43.230	11 . 51	
04	PNBP	-	43.230	-	-	-	43.230	014	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>1.425.175</b>	-	-	-	<b>1.425.175</b>		

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.  
Silmy Karim, S.E., M.E.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408814/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7784-2900-8166-8051

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408814) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408814	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	218.050	144.828	126.760	106.216	148.962	210.786	153.845	128.028	126.072	61.628	0	1.425.175
		<b>BELANJA BARANG</b>	0	218.050	144.828	126.760	106.216	148.962	210.786	153.845	128.028	126.072	61.628	0	1.425.175
	013.06.BF.5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	0	218.050	144.828	126.760	106.216	148.962	210.786	153.845	128.028	126.072	61.628	0	1.425.175
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	218.050	144.828	126.760	106.216	148.962	210.786	153.845	128.028	126.072	61.628	0	1.425.175

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.  
Silmy Karim, S.E., M.E.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408814/2024  
IV A. B L O K I R**



DS:7784-2900-8166-8051

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [06] Ditjen Imigrasi  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [408814] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.  
Silmy Karim, S.E., M.E.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408814/2024  
IV B. C A T A T A N**



DS:7784-2900-8166-8051

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [06] Ditjen Imigrasi  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [408814] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

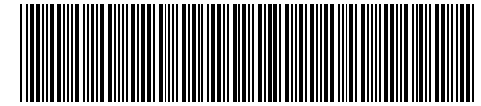
Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.  
Silmy Karim, S.E., M.E.





**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.408813/2024**



DS:6264-5474-4553-5020

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
  2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
  3. Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
  4. Kode>Nama Satker : (408813) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN
- Sebesar : Rp. 1.339.547.000 ( SATU MILIAR TIGA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
013.05.BF.5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

	Jumlah Uang
Rp.	1.339.547.000
Rp.	1.339.547.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	1.339.547.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN PALEMBANG (014) Rp. 1.339.547.000

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408813/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



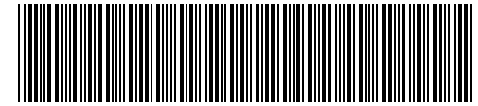
DS:6264-5474-4553-5020

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408813) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

Halaman : I A. 1

Program	: 013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.339.547.000
Kegiatan	: 5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	1.339.547.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	
	: 2. 01	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	
	: 3. 01	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	
	: 4. 01	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	
	: 5. 01	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	
	: 6. 01	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	
	: 7. 01	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	
	: 8. 01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	
	: 9. 02	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	
	: 10. 02	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
	: 11. 02	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	
	: 12. 02	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	
	: 13. 02	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	
	: 14. 02	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	
	: 15. 02	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	
	: 16. 03	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	
	: 17. 03	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	
	: 18. 03	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	
	: 19. 03	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	
	: 20. 03	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	
	: 21. 03	persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408813/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6264-5474-4553-5020

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408813) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

Halaman : I A. 2

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

- 22. 04 Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
- 23. 04 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
- 24. 04 Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
- 25. 04 Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
- 26. 05 Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
- 27. 05 Persentase tahanan/harapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- 28. 06 Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
- 29. 06 Persentase tahanan/harapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- 30. 07 Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi
- 31. 07 Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
- 32. 08 Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Klasifikasi Rincian Output	1	:	5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	104,00	orang	253.618.000
Rincian Output		:	01	AEF.001 Pembinaan Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	104,00	orang	253.618.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	5252.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	26,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	910.397.000
Rincian Output		:	01	BDB.001 Fasilitasi dan Pembinaan UPT Pemasyarakatan	26,00	Unit Kerja	910.397.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	12,00	operasi, Hari Operasi	175.532.000
Rincian Output		:	01	BHB.001 Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	12,00	operasi	175.532.000

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NIP. 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**NOMOR : DIPA- 013.05.2.408813/2024**

**I B. SUMBER DANA**



DS:6264-5474-4553-5020

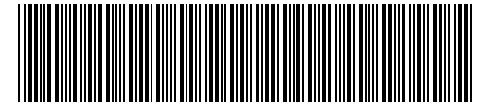
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
 Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
 Kode>Nama Satker : (408813) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	1.339.547.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.339.547.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408813/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6264-5474-4553-5020

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408813) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN  
Kewenangan : (KD)

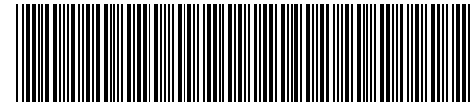
Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
408813	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN	-	1.339.547	-	-	-	1.339.547		
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.339.547	-	-	-	1.339.547		
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	-	1.339.547	-	-	-	1.339.547		
5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	253.618	-	-	-	253.618	11 . 51	
01	RM	-	253.618	-	-	-	253.618	014	
5252.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	910.397	-	-	-	910.397	11 . 51	
01	RM	-	910.397	-	-	-	910.397	014	
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	175.532	-	-	-	175.532	11 . 51	
01	RM	-	175.532	-	-	-	175.532	014	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>1.339.547</b>	-	-	-	<b>1.339.547</b>		

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NIP. 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408813/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6264-5474-4553-5020

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408813) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408813	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	186.161	155.510	166.574	220.763	121.612	93.155	175.368	36.967	132.055	36.966	14.416	1.339.547
		<b>BELANJA BARANG</b>	0	186.161	155.510	166.574	220.763	121.612	93.155	175.368	36.967	132.055	36.966	14.416	1.339.547
	013.05.BF.5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	0	186.161	155.510	166.574	220.763	121.612	93.155	175.368	36.967	132.055	36.966	14.416	1.339.547
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	186.161	155.510	166.574	220.763	121.612	93.155	175.368	36.967	132.055	36.966	14.416	1.339.547

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NIP. 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408813/2024  
IV A. B L O K I R**



DS:6264-5474-4553-5020

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [408813] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NIP. 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408813/2024  
IV B. C A T A T A N**



DS:6264-5474-4553-5020

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [408813] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

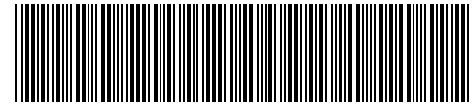
Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NIP. 67090332





**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 013.03.2.408812/2024**



DS:8007-5175-3181-6464

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
  2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
  3. Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
  4. Kode>Nama Satker : (408812) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN
- Sebesar : Rp. 2.939.735.000 ( DUA MILIAR SEMBILAN RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
013.03.BF.5251 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

	Jumlah Uang
Rp.	2.939.735.000
Rp.	2.939.735.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	2.939.735.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PALEMBANG (014) Rp. 2.939.735.000

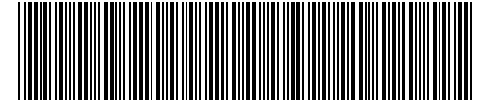
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408812/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8007-5175-3181-6464

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408812) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

Halaman : I A. 1

Program	:	013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			2.939.735.000
Kegiatan	:	5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			2.939.735.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan			
		2. 01	Persentase peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah			
		3. 01	Persentase permohonan Layanan BHP yang diselesaikan			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	5251.BAH Pelayanan Publik Lainnya	4,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	1.798.904.000
Rincian Output		:	01 BAH.001 Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	4,00	layanan	1.798.904.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	5251.BCB Perkara Hukum Lembaga	1,00	Perkara, Berkas Perkara	9.450.000
Rincian Output		:	01 BCB.001 Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	1,00	Perkara	9.450.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	5251.BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	7,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	1.131.381.000
Rincian Output		:	01 BIC.001 Pengawasan kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah	7,00	Lembaga	1.131.381.000

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**NOMOR : DIPA- 013.03.2.408812/2024**

**I B. SUMBER DANA**



DS:8007-5175-3181-6464

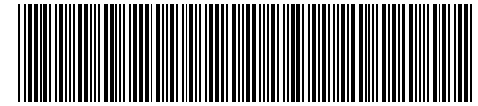
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum  
 Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
 Kode>Nama Satker : (408812) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	2.939.735.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	2.939.735.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408812/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8007-5175-3181-6464

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408812) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN  
Kewenangan : (KD)

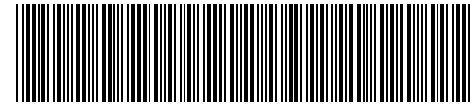
Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408812	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN	-	2.939.735	-	-	-	2.939.735		
013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.939.735	-	-	-	2.939.735		
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	2.939.735	-	-	-	2.939.735		
5251.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	1.798.904	-	-	-	1.798.904	11 . 51	
04	PNBP	-	1.798.904	-	-	-	1.798.904	014	
5251.BCB	Perkara Hukum Lembaga (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	9.450	-	-	-	9.450	11 . 51	
04	PNBP	-	9.450	-	-	-	9.450	014	
5251.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	1.131.381	-	-	-	1.131.381	11 . 51	
04	PNBP	-	1.131.381	-	-	-	1.131.381	014	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>2.939.735</b>	-	-	-	<b>2.939.735</b>		

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408812/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8007-5175-3181-6464

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408812) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

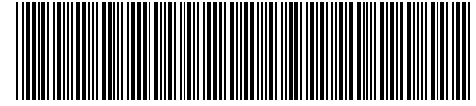
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408812	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	521.088	122.061	257.375	241.364	344.955	251.706	615.871	251.614	131.511	122.061	80.131	2.939.735
		<b>BELANJA BARANG</b>	0	521.088	122.061	257.375	241.364	344.955	251.706	615.871	251.614	131.511	122.061	80.131	2.939.735
	013.03.BF.5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	521.088	122.061	257.375	241.364	344.955	251.706	615.871	251.614	131.511	122.061	80.131	2.939.735
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	521.088	122.061	257.375	241.364	344.955	251.706	615.871	251.614	131.511	122.061	80.131	2.939.735

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408812/2024  
IV A. B L O K I R**



DS:8007-5175-3181-6464

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Administrasi Hukum Umum  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [408812] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

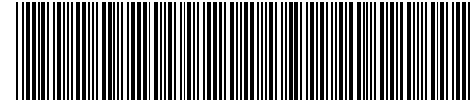
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408812/2024  
IV B. C A T A T A N**



DS:8007-5175-3181-6464

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Administrasi Hukum Umum  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [408812] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP 196909181994031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.408819/2024**



DS:1372-0861-2590-2600

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
  2. Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
  3. Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
  4. Kode>Nama Satker : (408819) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN
- Sebesar : Rp. 1.678.055.000 ( SATU MILIAR ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.678.055.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PALEMBANG (014) Rp. 1.678.055.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001



**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**NOMOR : DIPA- 013.10.2.408819/2024**



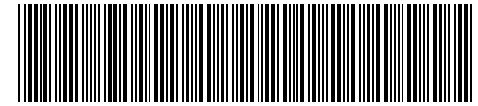
DS:1372-0861-2590-2600

Satker : (408819) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

---

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	128.253.000
BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	128.253.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	1.549.802.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	1.549.802.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408819/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



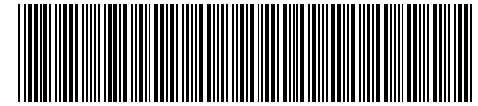
DS:1372-0861-2590-2600

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408819) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			128.253.000
Kegiatan	:	5256	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah			128.253.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan			
		2. 02	Jumlah fasilitas Perencanaan Perda			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	34.621.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	34.621.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5256.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	93.632.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitas Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga	93.632.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.549.802.000
Kegiatan	:	4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah			1.549.802.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah			
		2. 01	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan/permintaan layanan bantuan hukum litigasi			
		3. 01	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap dari usulan kantor wilayah			
		4. 02	Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan/permintaan layanan bantuan hukum non-litigasi			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4841.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	9,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	77.132.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah	9,00	Lembaga	77.132.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408819/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1372-0861-2590-2600

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408819) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	2	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		7,00	Kelompok Masyarakat	99.750.000
Rincian Output		:	01	BDD.001	Layanan penyuluhan hukum di Daerah	2,00	Kelompok Masyarakat	25.830.000
		:	02	BDD.002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	5,00	Kelompok Masyarakat	73.920.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		13,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	71.239.000
Rincian Output		:	01	BIC.001	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	13,00	Lembaga	71.239.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4841.PDE	Akreditasi Lembaga		13,00	Lembaga, Unit Kerja	85.621.000
Rincian Output		:	01	PDE.001	Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah (PN)	13,00	Lembaga	85.621.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		128,00	Orang	1.024.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	128,00	Orang	1.024.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		18,00	Kelompok Masyarakat, Kegiatan	192.060.000
Rincian Output		:	01	QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	18,00	Kegiatan	192.060.000

Jakarta, 24 November 2023  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

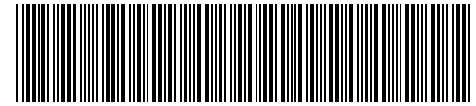
ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.10.2.408819/2024

I B. SUMBER DANA



DS:1372-0861-2590-2600

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
 Kode>Nama Satker : (408819) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	1.678.055.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.678.055.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408819/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



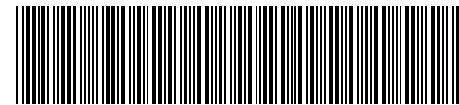
DS:1372-0861-2590-2600

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408819) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408819	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN	-	1.678.055	-	-	-	1.678.055		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	128.253	-	-	-	128.253		
5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	-	128.253	-	-	-	128.253		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	34.621	-	-	-	34.621	11 . 51	
01 RM		-	34.621	-	-	-	34.621	014	
5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	93.632	-	-	-	93.632	11 . 51	
01 RM		-	93.632	-	-	-	93.632	014	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.549.802	-	-	-	1.549.802		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	1.549.802	-	-	-	1.549.802		
4841.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	77.132	-	-	-	77.132	11 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408819/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



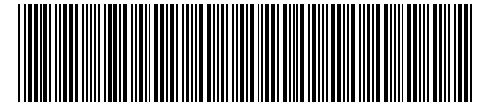
DS:1372-0861-2590-2600

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408819) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	77.132	-	-	-	77.132	014	
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	99.750	-	-	-	99.750	11 . 51	
01 RM		-	99.750	-	-	-	99.750	014	
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	71.239	-	-	-	71.239	11 . 51	
01 RM		-	71.239	-	-	-	71.239	014	
4841.PDE	Akreditasi Lembaga (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	85.621	-	-	-	85.621	11 . 51	
01 RM		-	85.621	-	-	-	85.621	014	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	1.024.000	-	-	-	1.024.000	11 . 51	
01 RM		-	1.024.000	-	-	-	1.024.000	014	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408819/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1372-0861-2590-2600

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408819) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN  
Kewenangan : (KD)

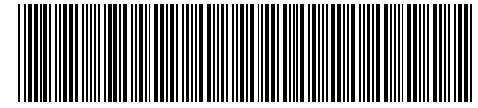
Halaman : II. 3  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	192.060	-	-	-	192.060	11 . 51	
01	RM	-	192.060	-	-	-	192.060	014	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>1.678.055</b>	-	-	-	<b>1.678.055</b>		

Jakarta, 24 November 2023  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408819/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1372-0861-2590-2600

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408819) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408819	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	115.940	144.662	227.311	247.382	229.648	163.455	187.516	212.161	113.151	36.180	649	1.678.055
		<b>BELANJA BARANG</b>	0	115.940	144.662	227.311	247.382	229.648	163.455	187.516	212.161	113.151	36.180	649	1.678.055
	013.10.BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	0	0	2.001	53.251	43.951	6.428	705	5.716	9.701	1.521	4.330	649	128.253
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	2.001	53.251	43.951	6.428	705	5.716	9.701	1.521	4.330	649	128.253
	013.10.BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	0	115.940	142.661	174.060	203.431	223.220	162.750	181.800	202.460	111.630	31.850	0	1.549.802
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	115.940	142.661	174.060	203.431	223.220	162.750	181.800	202.460	111.630	31.850	0	1.549.802

Jakarta, 24 November 2023  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP. 197105011993031001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408819/2024  
IV A. B L O K I R**



DS:1372-0861-2590-2600

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [408819] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408819/2024  
IV B. C A T A T A N**



DS:1372-0861-2590-2600

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [408819] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

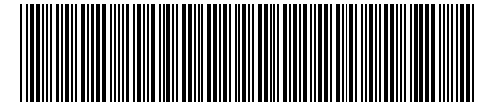
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP. 197105011993031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 013.11.2.408820/2024**



DS:4439-2001-0425-1073

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013)    | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  |
| 2. Unit Organisasi            | : (11)     | Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia                             |
| 3. Provinsi                   | : (11)     | SUMATERA SELATAN  |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (408820) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM<br>DAN HAM SUMATERA SELATAN                              |
| Sebesar                       | : Rp.      | 285.196.000 ( DUA RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.11.WA Program Dukungan Manajemen

013.11.WA. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah

	Jumlah Uang
Rp.	285.196.000
Rp.	285.196.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	285.196.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN PALEMBANG (014) Rp. 285.196.000

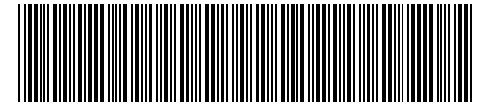
**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408820/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4439-2001-0425-1073

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408820) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

Halaman : I A. 1

Program	:	013.11.WA	Program Dukungan Manajemen			285.196.000
Kegiatan	:	5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah			285.196.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5248.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	285.196.000
Rincian Output	:	01	ABD.001 Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	4,00	Rekomendasi Kebijakan	276.485.000
	:	02	ABD.002 Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	8.711.000

Jakarta, 24 November 2023  
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

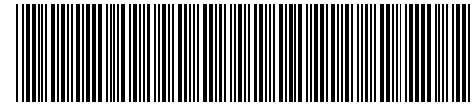
ttd.  
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.  
NIP. 196503221987031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**NOMOR : DIPA- 013.11.2.408820/2024**

**I B. SUMBER DANA**



DS:4439-2001-0425-1073

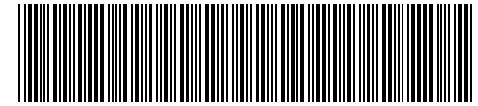
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
 Kode>Nama Satker : (408820) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

		Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	285.196.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	285.196.000		(2) RPLN US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408820/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4439-2001-0425-1073

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408820) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN  
Kewenangan : (KD)

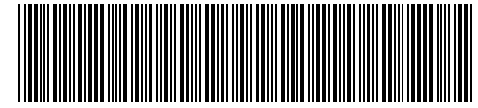
Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408820	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN	-	285.196	-	-	-	285.196		
013.11.WA	Program Dukungan Manajemen	-	285.196	-	-	-	285.196		
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	-	285.196	-	-	-	285.196		
5248.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	285.196	-	-	-	285.196	11 . 51	
01	RM	-	285.196	-	-	-	285.196	014	
<b>JUMLAH</b>		-	285.196	-	-	-	285.196		

Jakarta, 24 November 2023  
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.  
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.  
NIP. 196503221987031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408820/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4439-2001-0425-1073

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408820) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

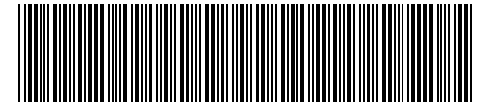
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408820	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	32.734	32.453	27.677	32.358	36.823	36.452	24.446	27.527	20.780	13.948	0	285.196
		<b>BELANJA BARANG</b>	0	32.734	32.453	27.677	32.358	36.823	36.452	24.446	27.527	20.780	13.948	0	285.196
	013.11.WA.5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	0	32.734	32.453	27.677	32.358	36.823	36.452	24.446	27.527	20.780	13.948	0	285.196
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	32.734	32.453	27.677	32.358	36.823	36.452	24.446	27.527	20.780	13.948	0	285.196

Jakarta, 24 November 2023  
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.  
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.  
NIP. 196503221987031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408820/2024  
IV A. B L O K I R**



DS:4439-2001-0425-1073

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [408820] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

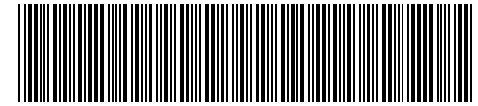
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.  
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.  
NIP. 196503221987031002



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408820/2024  
IV B. C A T A T A N**



DS:4439-2001-0425-1073

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [408820] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

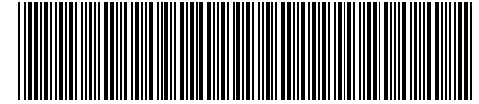
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.  
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.  
NIP. 196503221987031002



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 013.09.2.408817/2024**



DS:8109-2468-1098-1596

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
  2. Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
  3. Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
  4. Kode>Nama Satker : (408817) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN
- Sebesar : Rp. 229.734.000 ( DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.09.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM  
013.09.BG. Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah

	Jumlah Uang
Rp.	229.734.000
Rp.	229.734.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- |                               |     |             |                                |     |   |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 229.734.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB                        |     |             | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan              | Rp. | 0           | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
|                               |     |             | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0           | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 0           | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0           | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PALEMBANG (014) Rp. 229.734.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408817/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8109-2468-1098-1596

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408817) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

Halaman : I A. 1

Program	:	013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM			229.734.000
Kegiatan	:	5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah			229.734.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM			
		2. 01	Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah			
		3. 02	Jumlah kab/kota peduli HAM			
		4. 03	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	5255.BAH Pelayanan Publik Lainnya	1,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	65.154.000
Rincian Output		:	01 BAH.001 Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah	1,00	layanan	65.154.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	5255.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	24.306.000
Rincian Output		:	01 BDB.001 Fasilitasi Pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM	1,00	Lembaga	24.306.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	5255.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	10,00	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, KabKota	140.274.000
Rincian Output		:	01 FBA.001 Fasilitasi Aksi HAM di Wilayah	3,00	Kab/Kota	45.009.000
		:	02 FBA.002 Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	3,00	Kab/Kota	23.470.000
		:	03 FBA.003 Penilaian Kab/Kota Peduli HAM di Wilayah	3,00	Kab/Kota	39.658.000
		:	04 FBA.004 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang Berperspektif HAM di Wilayah	1,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	32.137.000

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

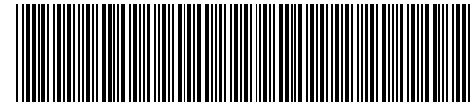
ttd.  
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.  
NIP 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**NOMOR : DIPA- 013.09.2.408817/2024**

**I B. SUMBER DANA**



DS:8109-2468-1098-1596

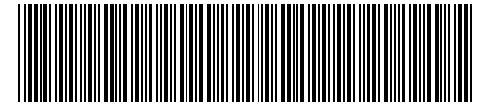
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia  
 Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
 Kode>Nama Satker : (408817) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	229.734.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	229.734.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408817/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8109-2468-1098-1596

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408817) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN  
Kewenangan : (KD)

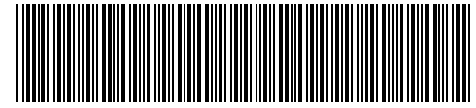
Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408817	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN	-	229.734	-	-	-	229.734		
013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	-	229.734	-	-	-	229.734		
5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	-	229.734	-	-	-	229.734		
5255.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	65.154	-	-	-	65.154	11 . 51	
01	RM	-	65.154	-	-	-	65.154	014	
5255.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	24.306	-	-	-	24.306	11 . 51	
01	RM	-	24.306	-	-	-	24.306	014	
5255.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	140.274	-	-	-	140.274	11 . 51	
01	RM	-	140.274	-	-	-	140.274	014	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>229.734</b>	-	-	-	<b>229.734</b>		

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.  
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.  
NIP 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408817/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8109-2468-1098-1596

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408817) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	408817	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN</b>														
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.568	229.734
		<b>BELANJA BARANG</b>	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.568	229.734
	013.09.BG.5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.568	229.734
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.568	229.734

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.  
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.  
NIP 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408817/2024  
IV A. B L O K I R**



DS:8109-2468-1098-1596

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [09] Ditjen Hak Asasi Manusia  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [408817] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

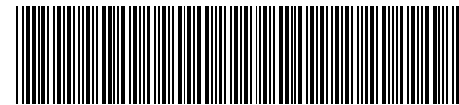
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.  
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.  
NIP 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408817/2024  
IV B. C A T A T A N**



DS:8109-2468-1098-1596

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [09] Ditjen Hak Asasi Manusia  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [408817] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

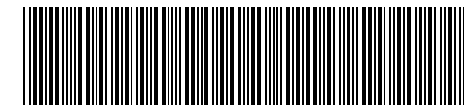
Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.  
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.  
NIP 196909091993031001





**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 013.07.2.408815/2024**



DS:3688-6026-3461-0191

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
  2. Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
  3. Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
  4. Kode>Nama Satker : (408815) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN
- Sebesar : Rp. 1.875.570.000 ( SATU MILIAR DELAPAN RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.07.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

013.07.BF.5253 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

	Jumlah Uang
Rp.	1.875.570.000
Rp.	1.875.570.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- |                               |     |               |                                |     |   |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 0             | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP                       |     |               | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan              | Rp. | 1.875.570.000 | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0             | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 0             | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0             | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0 |
|                               |     |               | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PALEMBANG (014) Rp. 1.875.570.000

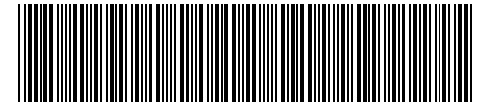
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408815/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3688-6026-3461-0191

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408815) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

Halaman : I A. 1

Program	:	013.07.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.875.570.000
Kegiatan	:	5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			1.875.570.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Penegakan hukum KI di Wilayah			
		2. 01	Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di Wilayah			
		3. 02	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5253.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	650,00	Orang	1.783.010.000
Rincian Output	:	01	BDC.001 Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	500.00	Orang	827.608.000
		02	BDC.002 Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	100.00	Orang	128.741.000
		03	BDC.003 Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	50.00	Orang	826.661.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5253.BKB	Pemantauan produk	2,00	laporan	92.560.000
Rincian Output	:	01	BKB.001 Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	2.00	laporan	92.560.000

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

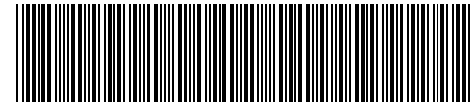
ttd.  
MIN USIHEN, S.H., M.H.  
NIP. 196903091994032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**NOMOR : DIPA- 013.07.2.408815/2024**

**I B. SUMBER DANA**



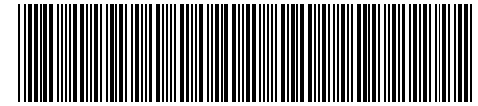
DS:3688-6026-3461-0191

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual  
 Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
 Kode>Nama Satker : (408815) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

		Rp.	1.875.570.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Anggaran Tahun 2024					(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni			0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB			1.875.570.000		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri			0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri			0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung			0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
6. SBSN PBS			0		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :									(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408815/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3688-6026-3461-0191

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408815) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN  
Kewenangan : (KD)

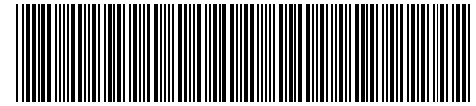
Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408815	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN	-	1.875.570	-	-	-	1.875.570		
013.07.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.875.570	-	-	-	1.875.570		
5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	1.875.570	-	-	-	1.875.570		
5253.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	1.783.010	-	-	-	1.783.010	11 . 51	
04	PNBP	-	1.783.010	-	-	-	1.783.010	014	
5253.BKB	Pemantauan produk (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	92.560	-	-	-	92.560	11 . 51	
04	PNBP	-	92.560	-	-	-	92.560	014	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>1.875.570</b>	-	-	-	<b>1.875.570</b>		

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.  
MIN USIHEN, S.H., M.H.  
NIP. 196903091994032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408815/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3688-6026-3461-0191

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408815) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

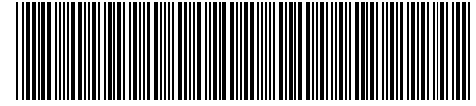
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408815	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	259.375	194.055	67.432	594.314	190.448	177.101	299.970	44.752	26.221	10.950	10.950	1.875.570
		<b>BELANJA BARANG</b>	0	259.375	194.055	67.432	594.314	190.448	177.101	299.970	44.752	26.221	10.950	10.950	1.875.570
	013.07.BF.5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	0	259.375	194.055	67.432	594.314	190.448	177.101	299.970	44.752	26.221	10.950	10.950	1.875.570
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	259.375	194.055	67.432	594.314	190.448	177.101	299.970	44.752	26.221	10.950	10.950	1.875.570

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.  
MIN USIHEN, S.H., M.H.  
NIP. 196903091994032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408815/2024  
IV A. B L O K I R**



DS:3688-6026-3461-0191

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [07] Ditjen Kekayaan Intelektual  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [408815] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

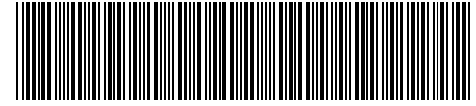
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.  
MIN USIHEN, S.H., M.H.  
NIP. 196903091994032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408815/2024  
IV B. C A T A T A N**



DS:3688-6026-3461-0191

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [07] Ditjen Kekayaan Intelektual  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [408815] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

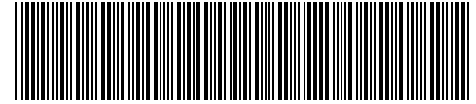
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.  
MIN USIHEN, S.H., M.H.  
NIP. 196903091994032001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 013.08.2.408816/2024**



DS:1402-6468-5073-2090

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
  2. Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
  3. Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
  4. Kode>Nama Satker : (408816) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN
- Sebesar : Rp. 455.000.000 ( EMPAT RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.08.BB Program Pembentukan Regulasi

013.08.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 455.000.000

Rp. 455.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	455.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PALEMBANG (014) Rp. 455.000.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

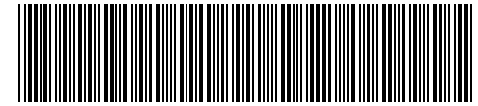
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408816/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1402-6468-5073-2090

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408816) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

Halaman : I A. 1

Program	: 013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi			455.000.000
Kegiatan	: 5250	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah			455.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan			
	: 2. 01	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	24,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	286.051.000
Rincian Output	: 01 ABD.001	Rekomendasi Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah	24,00	Rekomendasi Kebijakan	286.051.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	21,00	Orang	168.949.000
Rincian Output	: 01 ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	21,00	Orang	168.949.000

Jakarta, 24 November 2023

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.

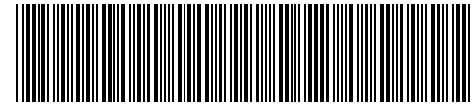
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum  
NIP. 196908141996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.08.2.408816/2024

I B. SUMBER DANA



DS:1402-6468-5073-2090

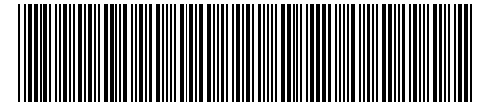
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
 Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
 Kode>Nama Satker : (408816) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	455.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	455.000.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408816/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1402-6468-5073-2090

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408816) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN  
Kewenangan : (KD)

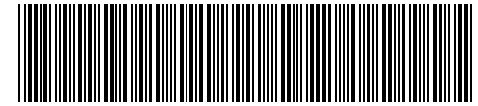
Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408816	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN	-	455.000	-	-	-	455.000		
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	455.000	-	-	-	455.000		
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	455.000	-	-	-	455.000		
5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	286.051	-	-	-	286.051	11 . 51	
01	RM	-	286.051	-	-	-	286.051	014	
5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	168.949	-	-	-	168.949	11 . 51	
01	RM	-	168.949	-	-	-	168.949	014	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>455.000</b>	-	-	-	<b>455.000</b>		

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum  
NIP. 196908141996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408816/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1402-6468-5073-2090

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408816) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

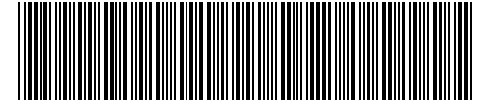
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408816	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	7.435	83.940	58.099	28.809	48.386	58.232	22.466	40.655	12.526	23.387	9.036	62.028	455.000
		<b>BELANJA BARANG</b>	7.435	83.940	58.099	28.809	48.386	58.232	22.466	40.655	12.526	23.387	9.036	62.028	455.000
	013.08.BB.5250	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	7.435	83.940	58.099	28.809	48.386	58.232	22.466	40.655	12.526	23.387	9.036	62.028	455.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	7.435	83.940	58.099	28.809	48.386	58.232	22.466	40.655	12.526	23.387	9.036	62.028	455.000

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum  
NIP. 196908141996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408816/2024  
IV A. B L O K I R**



DS:1402-6468-5073-2090

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [408816] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum  
NIP. 196908141996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408816/2024  
IV B. C A T A T A N**



DS:1402-6468-5073-2090

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [408816] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum  
NIP. 196908141996031001